



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIDODO BUDI PRASETYO**
2. Jabatan : **WAKIL DIREKTUR**
3. NHK : **766523**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.190.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 342 m2/200 m2 di KAB / KOTA MALANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/200 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 542 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. Tanah Seluas 495 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **258.400.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **240.700.000**

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **770.621.890**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	500.000
Sub Total	Rp.	3.460.221.890
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.460.221.890

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.